



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 3, JALAN SOEKARNO HATTA, MAMUJU, SULAWESI BARAT 91611
TELEPON (0426) 2325034; FAKSIMILI (0426) 2325033; SITUS www.perbendaharaansulbar.org

Nomor : S-1137/WPB.26/BD.02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan III
Tahun 2018 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat

14 November 2018



Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p.
Direktur Pelaksanaan Anggaran
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun *softcopy* laporan dalam bentuk file *pdf* telah disampaikan ke alamat [email ditpa@kemenkeu.go.id](mailto:ditpa@kemenkeu.go.id) dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor,


D Doddy Handaryadi 



KAJIAN FISKAL REGIONAL



Peningkatan *Runway*
Bandara Tampo Padang



Sports Centre Majene



PLTU Belang-Belang

Triwulan III
2018

Tim Penyusun:

Penanggung jawab: Kakanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat

Ketua Tim: Kabid PPA II **Editor & Grafis:** Budy Prastowo

Anggota: Arvis Ali Baso | Christmas Kurnianto | Mardiyana |
Hepy Yudha Hariyanto | Ronald Rannu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1 Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Inflasi	2
1.3 Indikator Kesejahteraan	3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
2.1 Pendapatan Negara	5
2.1.1 Penerimaan Perpajakan	5
2.2 Belanja Negara	8
2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat	8
2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	8
2.2.3 Satuan Kerja yang Berpotensi Menjadi BLU	9
2.2.4 Manajemen Investasi Pusat.....	10
2.3 Prognosis Realisasi APBN	10
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
3.1 Pendapatan Daerah	13
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	13
3.1.2 Pendapatan Transfer	14
3.1.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15
3.2 Belanja Daerah	15
3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.....	15
3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan	16
3.3 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018	16
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN	
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	17
4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN	17
4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	17
4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan	17
4.2.2 Analisis Perubahan.....	18
4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian	19

4.3	Belanja Konsolidasian	20
4.3.1	Analisis Proporsi dan Perbandingan	20
4.3.2	Analisis Perubahan.....	20
4.3.3	Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional	21
4.4	Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB	22
BAB V	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	23
5.1	Optimalisasi Kebijakan Fiskal Regional untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.....	23
REFERENSI	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan antara Target dan Realisasi Beberapa Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sulawesi Barat s.d. Triwulan III 2018.....	4
Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018	5
Tabel 2.2	Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker pengguna PNBPN	9
Tabel 2.3	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018.....	10
Tabel 2.4	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018.....	10
Tabel 3.1	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	12
Tabel 3.2	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018	16
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan III Tahun 2018.....	17
Tabel 4.2	Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK dengan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulbar Triwulan III 2017-2018.....	19
Tabel 4.3	Kontribusi Belanja Operasional dan Modal Konsolidasian terhadap PDRB (ADHB) Prov. Sulbar s.d. Triwulan III 2018	22
Tabel 5.1	PDRB per Kapita 2017 dan Realisasi Belanja Modal Infrastruktur Bidang Pendidikan dan Kesehatan APBD Pemkab lingkup Provinsi Sulbar s.d. Triwulan III 2018	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan Tahun 2016 - 2018.....	1
Grafik 1.2	Komposisi PDRB ADHB Prov. Sulawesi Barat Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan III Tahun 2018	1
Grafik 1.3Inflasi Tahunan (<i>yoy</i>) dan Bulanan (<i>mtm</i>) Sulawesi Barat dan Nasional	2
Grafik 1.4	Tren Tingkat Kemiskinan Sulawesi Barat Periode Maret 2015 s.d. Maret 2018	4
Grafik 2.1	Realisasi Penerimaan PPh per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat.....	6
Grafik 2.2	Realisasi Penerimaan PPN per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat.....	6
Grafik 2.3	Realisasi Penerimaan PPnBM per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat.....	7
Grafik 2.4	Realisasi Penerimaan PNBP dari Empat Jenis PNBP Terbesar per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan III 2018	7
Grafik 2.5	Tren Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018	8
Grafik 2.6	Tren Persentase Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018	8
Grafik 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018.....	13
Grafik 3.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018.....	13
Grafik 3.3	Realisasi Penerimaan HKDyD Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018.....	14
Grafik 3.4	Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi Sulawesi Barat	14
Grafik 3.5	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.....	15
Grafik 3.6	Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan III Tahun 2018.....	16

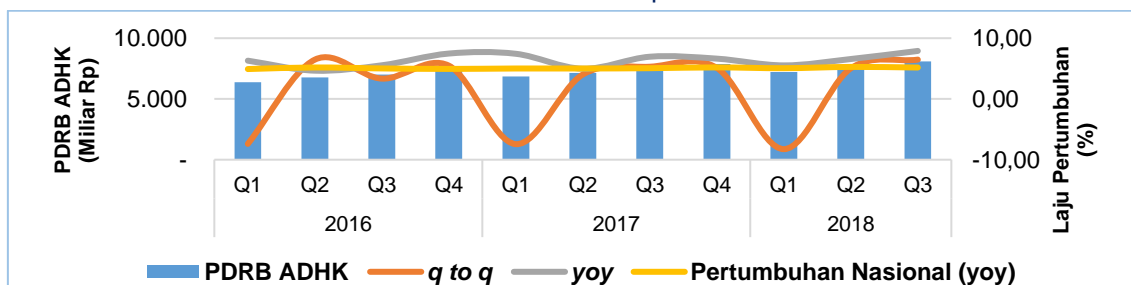
Grafik 4.1	Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2017 dan 2018.....	17
Grafik 4.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Sulbar s.d. Triwulan III 2018	18
Grafik 4.3	Perubahan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Sulbar	18
Grafik 4.4	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan III 2018	20
Grafik 4.5	Perubahan Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Prov. Sulbar..	20
Grafik 4.6	Hubungan Belanja Pemerintah Konsolidasian dengan beberapa Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sulbar s.d. Triwulan III 2018.....	22
Grafik 5.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Sulampua <i>q to q</i> dan <i>yoy</i> Triwulan III 2018	23
Grafik 5.2	Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional dan Laju PDRB.....	24

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pada periode Triwulan III 2018, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sulawesi Barat (Sulbar) mencapai Rp11,38 triliun, tumbuh sebesar 6,47 persen dari triwulan sebelumnya. Perbandingan tahunan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulbar melejit hingga 7,9 persen (*yoy*), tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulbar jauh melampaui capaian nasional sebesar 5,17 persen (*yoy*), namun karena skala ekonomi yang relatif kecil membuat kontribusi Sulbar hanya sebesar 0,3 persen terhadap PDB Nasional. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6,74 persen, bergerak mendekati target pemerintah Sulbar pada kisaran 7,1-7,4 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan Tahun 2016 - 2018



Sumber: BPS Pusat, BPS Sulbar (diolah)

Dari sisi produksi, sektor pertanian mengalami sedikit kontraksi seiring dengan menguatnya kontribusi sektor lainnya. Akselerasi pada sektor administrasi pemerintahan yang meroket dari 7,92 persen menjadi 44,89 persen (*q to q*) membuat pertumbuhan ekonomi pada periode ini lebih baik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pola belanja pemerintah yang biasanya menguat pada triwulan III. Selain administrasi pemerintahan, sektor industri pengolahan turut mengalami percepatan sebesar 5,60 persen (*q to q*) setelah mengalami kontraksi 2,41 persen pada periode sebelumnya. Hal tersebut berhubungan dengan adanya peningkatan produk olahan *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi *stearin*, *olein*, dan *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD).

Grafik 1.2 Komposisi PDRB ADHB Prov. Sulawesi Barat Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan III Tahun 2018



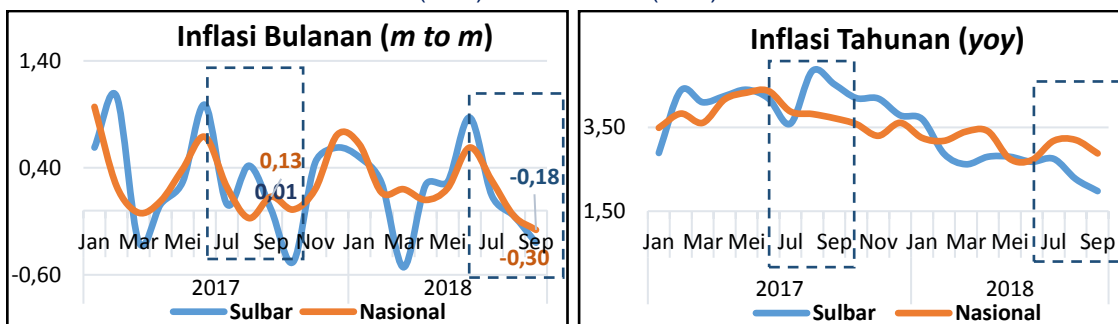
Sumber: BPS Sulbar (diolah)

Sementara dari sisi konsumsi, ekspansi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) menggerus dominasi Konsumsi Rumah Tangga. Sektor PKP tumbuh paling tinggi sebesar 45,77 persen sehubungan dengan peningkatan pada Belanja Pegawai berupa pencairan gaji dan tunjangan ke-13, serta didorong pula oleh Belanja Barang dan Modal (termasuk DAK Fisik) yang mulai mengalami ekspansi. Diperkirakan sektor ini masih memberi andil besar terhadap pertumbuhan di triwulan IV mengingat masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sebesar kurang lebih sebesar 40 persen dari total pagu.

1.2 Inflasi

Inflasi Sulbar yang direpresentasikan oleh inflasi Mamuju menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tampak lebih bergejolak. Pada akhir periode Triwulan III 2018 (September), tercatat Sulbar mengalami deflasi yang cukup dalam hingga -0,30 (*m to m*). Deflasi tersebut menggiring tingkat inflasi tahunan pada angka 1,95 persen, cukup jauh berada di bawah target pemerintah Sulbar sebesar 3,23 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar deflasi yang terus terjadi tidak sampai menekan pertumbuhan ekonomi Sulbar. Selama periode triwulan III 2018, tingkat inflasi tahunan Sulbar terpaut hampir satu persen di bawah inflasi nasional.

Grafik 1.3 Inflasi Tahunan (YoY) dan Bulanan (*mtm*) Sulawesi Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Deflasi terdalam pada September 2018 dipicu oleh penurunan indeks harga pada tiga kelompok pengeluaran, yakni kelompok Bahan Makanan (1,86 persen), Pendidikan (0,06 persen), serta Transportasi dan Komunikasi (0,20 persen). Adapun komoditas yang memberi andil besar terhadap deflasi adalah ikan Cakalang (0,18 persen), ikan Layang (0,08 persen), dan Cabai Merah (0,07 persen). Memperhatikan tren inflasi selama beberapa periode terakhir, fluktuasi inflasi Sulbar sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile foods*, terutama dari sub kelompok ikan segar (jenis ikan Cakalang dan Layang). Oleh karena itu, pemerintah Sulbar perlu menaruh perhatian lebih terhadap sub kelompok dimaksud melalui program tertentu untuk mengendalikan laju inflasi.

1.3 Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat tahun 2017 yang dirilis oleh BPS Provinsi Sulbar pada April 2018 sebesar 64,30. Meskipun meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022 yang pada tahun 2017 diharapkan mencapai 64,80. Masih dibutuhkan *effort* yang besar untuk mengejar ketertinggalan dari capaian nasional sebesar 70,81. Sementara itu, meskipun IPM Sulbar tumbuh menggembirakan sebesar 1,10 persen (*yoy*), namun masih dibutuhkan tingkat pertumbuhan yang lebih besar agar mampu mencapai target IPM Sulbar tahun 2018 sebesar 66,62.

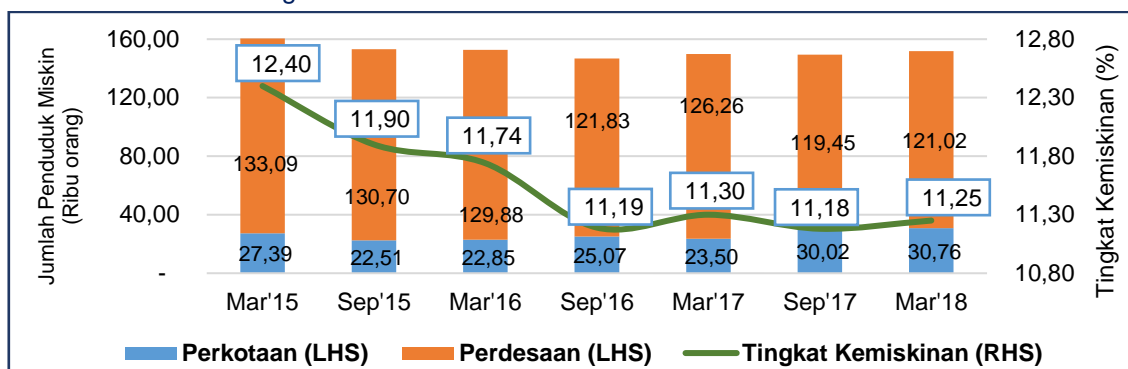
Selanjutnya, **kondisi ketenagakerjaan** Sulbar yang ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2018 tercatat sebesar 3,16 persen, menjauh dari target RPJMD Sulbar sebesar 2,96 persen. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan periode Agustus 2017, namun secara absolut jumlah pengangguran di wilayah Sulbar bertambah sebanyak 500 orang (*yoy*). Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,46 persen, menyusut 3,07 poin dibandingkan periode Februari 2018, namun mengalami kenaikan 1,50 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan TPAK selama setahun yang lalu memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja.

Selanjutnya jika ditinjau perbandingan kondisi perkotaan dan perdesaan, TPT Perkotaan meningkat dari 4,46 persen menjadi 6,11 persen (*yoy*) sedangkan TPT Perdesaan turun menjadi 2,43 persen dari sebelumnya 2,89 persen. Fenomena turunnya TPT Perdesaan disinyalir berkorelasi dengan realisasi Dana Desa, yang pada tahun ini dipersyaratkan adanya program *cash for work* minimal 30 persen. Kebijakan *cash for work* dimaksud mewajibkan pengalokasian dana desa untuk pekerjaan padat karya, dimana pekerjanya harus berasal dari SDM lokal.

Dilihat dari lapangan usahanya, sektor yang mengalami ekspansi dalam menyerap tenaga kerja adalah Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Administrasi Pemerintah. Masing-masing sektor tersebut mampu menyerap 323,3 ribu, 86,5 ribu, 46,4 ribu, dan 37,7 ribu pekerja. Peningkatan dimaksud sejalan dengan pertumbuhan pada sektor-sektor pembentuk PDRB sisi produksi yang turut mengalami akselerasi. Nampak bahwa sektor Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bahwa tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini didominasi oleh kelompok pekerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah yang juga merupakan kelompok pekerja keluarga yang tidak dibayar. Hal tersebut disinyalir menjadi penyebab kurang kuatnya korelasi antara perbaikan kondisi ketenagakerjaan dengan kondisi kemiskinan Sulbar.

Pada periode Maret 2018 lalu, **tingkat kemiskinan** Sulbar tercatat 11,25 persen. Dibandingkan dengan periode September 2017, angka tersebut meningkat 0,62 persen dan semakin menjauh untuk memenuhi target RPJMD Sulbar tahun 2018 sebesar 10,19 persen. Lebih lanjut, dari total 151,78 ribu penduduk miskin, hampir 80 persen di antaranya berada di daerah pedesaan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab semakin melebarnya angka **Gini Ratio** dari 0,339 pada September 2017 menjadi 0,370 pada Maret 2018.

Grafik 1.4 Tren Tingkat Kemiskinan Sulawesi Barat Periode Maret 2015 s.d. Maret 2018



Sumber: BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Kondisi kemiskinan Sulbar periode Maret 2018 tersebut tidak sejalan dengan perbaikan kondisi kemiskinan pada skala nasional yang mencapai 9,82 persen maupun perbaikan yang terjadi pada provinsi lain di Pulau Sulawesi. Peningkatan jumlah penduduk miskin Sulbar berhubungan dengan beberapa faktor antara lain kenaikan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 5,37 persen (yoy) menjadi Rp319.121 dan perekonomian Sulbar yang mengalami kontraksi cukup dalam (tumbuh -8,15% secara *q to q*) pada triwulan I 2018. Adapun data perbandingan antara target dan capaian indikator ekonomi dan kesejahteraan Sulbar dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Beberapa Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sulawesi Barat s.d. Triwulan III 2018

Indikator Ekonomi/Kesejahteraan	Target RPJMD Sulbar Tahun 2018	Realisasi Sementara (s.d. Triwulan III 2018)
Pertumbuhan Ekonomi	7,1% - 7,4%	6,74%
Inflasi	3,23%	1,95%
IPM	66,62	64,30 *
TPT	2,96%	3,16%
Tingkat Kemiskinan	10,19%	11,25%**
Gini Ratio	0,350	0,370**

Sumber: RPJMD Provinsi Sulbar Tahun 2017-2022; BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Keterangan: *) merupakan capaian IPM tahun 2017, capaian IPM tahun 2018 belum dirilis oleh BPS.

***) merupakan capaian periode Maret 2018

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)

URAIAN		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A.	PENDAPATAN NEGARA	882,18	379,78	775,01	398,63
	I. Penerimaan Dalam Negeri	882,18	379,78	775,01	398,63
	1. Penerimaan Pajak	853,26	341,21	745,26	354,60
	2. PNBPN	28,92	38,57	29,75	44,03
B.	BELANJA NEGARA	10.010,54	6.840,08	10.189,01	7.218,67
	I. Belanja Pemerintah Pusat	3.293,32	1.896,96	3.568,57	2.045,52
	1. Belanja Pegawai	943,17	648,72	1.000,70	717,50
	2. Belanja Barang	1.130,82	645,43	1.475,62	860,79
	3. Belanja Modal	1.206,09	595,52	1.084,50	463,93
	4. Belanja Bantuan Sosial	13,24	7,29	7,75	3,31
	II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	6.717,22	4.943,12	6.620,44	5.173,15
	1. Transfer ke Daerah	6.256,13	4.666,74	6.148,56	4.890,02
	a. Dana Perimbangan	6.089,96	4.500,57	5.958,06	4.699,52
	1) Dana Alokasi Umum	4.192,85	3.448,57	4.224,89	3.488,26
	2) Dana Bagi Hasil	218,15	92,00	100,38	65,32
	3) Dana Alokasi Khusus	1.678,96	960,00	1.632,79	1.145,94
	a) DAK Fisik	981,39	517,01	841,59	587,41
	b) DAK Non Fisik	697,56	442,99	791,20	558,53
	b. Dana Non Perimbangan	166,17	166,17	190,50	190,50
	2. Dana Desa	461,09	276,38	471,88	283,13
C.	SURPLUS/DEFISIT	(9.128,36)	(6.460,30)	(9.414,00)	(6.820,04)

Sumber: SPAN, Monev PA, SIMTRADA; KPP Pratama Mamuju; KPP Pratama Majene (diolah)

2.1 Pendapatan Negara

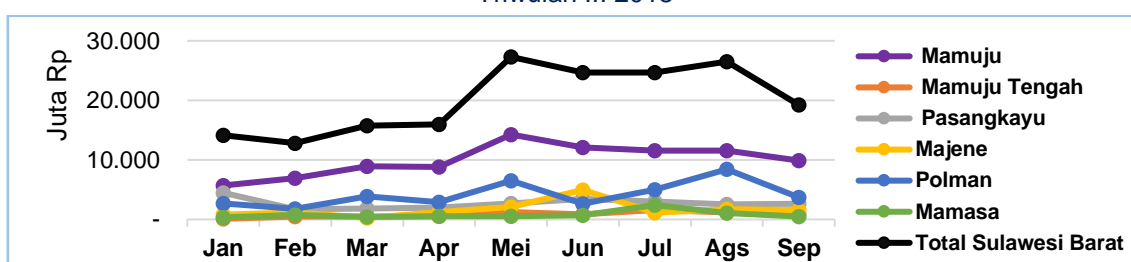
2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan pajak lingkup Sulbar pada periode Triwulan III 2018 sebesar Rp354 miliar atau 47,58 persen dari target penerimaan. Nilai realisasi tersebut berasal dari kontribusi KPP Pratama Mamuju sebesar Rp223 miliar dan sisanya sebesar Rp131 miliar merupakan kontribusi dari KPP Pratama Majene. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, capaian penerimaan pajak Sulbar mengalami kenaikan sebesar tiga persen (Rp13,39 miliar). Seperti periode sebelumnya, jenis pajak PPh dan PPN merupakan dua basis penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi masing-masing sebesar 51 persen dan 44 persen dari total penerimaan pajak. Secara agregat, penerimaan perpajakan terbesar terealisasi pada Agustus, sejalan dengan realisasi belanja pemerintah pusat yang paling banyak terserap pada bulan tersebut.

2.1.1.1 Pajak Penghasilan (PPH)

Jumlah penerimaan PPh Sulbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp181 miliar, didominasi oleh jenis PPh 21 sebesar Rp90 miliar. Realisasi PPh memuncak pada Agustus, didorong oleh penerimaan PPh 21 dari pencairan dana THR para pegawai sektor swasta dan BUMN yang baru disetor pada Agustus, khususnya di Kabupaten Polman. Kabupaten Mamuju menyumbang PPh paling banyak dengan kontribusi 49 persen sehubungan dengan dengan status kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dengan jumlah penduduk yang terbanyak kedua setelah kabupaten Polman.

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan III 2018

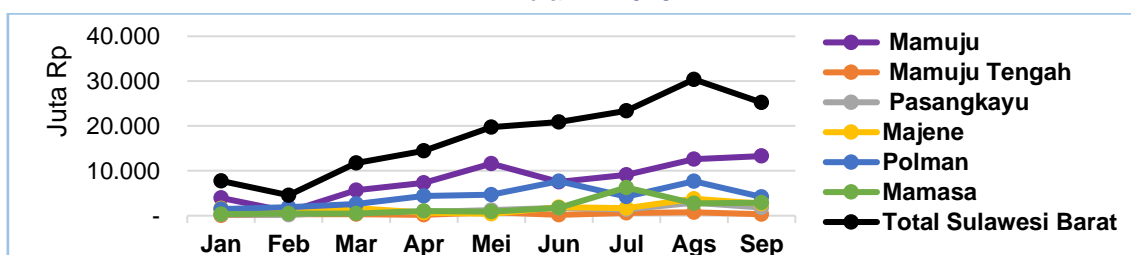


Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hingga triwulan III 2018, penerimaan PPN di Sulbar mencapai Rp158,1 miliar dengan realisasi terbesar berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar, dengan kontribusi masing-masing sebesar 45 persen dan 24 persen. Tren perkembangan penerimaan PPN di Polewali Mandar terakselerasi pada bulan Agustus, disinyalir berhubungan dengan tingginya transaksi perdagangan besar dan eceran sehubungan dengan perayaan Idul Adha yang tiba pada bulan tersebut. Kondisi yang sama terlihat pada realisasi penerimaan PPN kabupaten Mamuju yang meningkat pada bulan September. Kondisi tersebut berkaitan dengan penerimaan PPN dari potongan SPM realisasi belanja negara khususnya Belanja Modal untuk pekerjaan rekonstruksi jalan serta proyek perkuatan tebing yang dibangun pada periode dimaksud.

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan III 2018

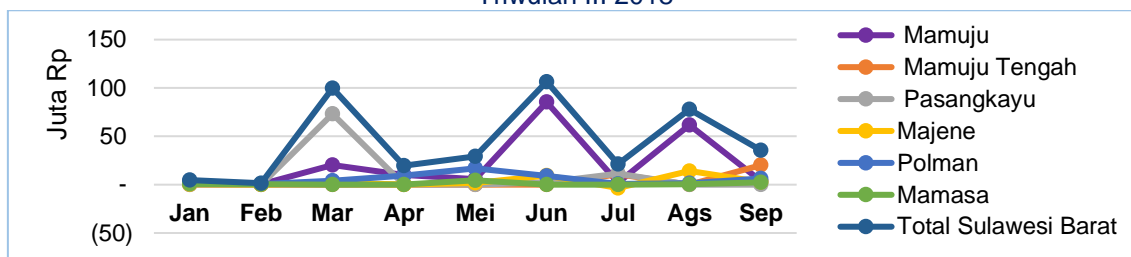


Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.1.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Realisasi PPnBM Sulbar sampai dengan akhir triwulan III 2018 mencapai Rp395,5 juta, dengan tren penerimaan yang terbesar pada bulan Maret, Juni, dan Agustus. Akselerasi realisasi PPnBM pada bulan Agustus terkonsentrasi di dua kabupaten yakni Mamuju dan Majene masing-masing sebesar Rp61,83 juta dan 14,16 juta. Hal tersebut berkorelasi dengan peningkatan penjualan barang mewah seperti kendaraan bermotor oleh dealer-dealer kendaraan di kedua kabupaten tersebut. Sementara itu, pada Juli 2018 realisasi PPnBM di Kabupaten Majene bernilai negatif sebesar Rp3,4 juta sehubungan dengan adanya restitusi PPnBM yang dilakukan oleh KPP Pratama Majene.

Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan III 2018

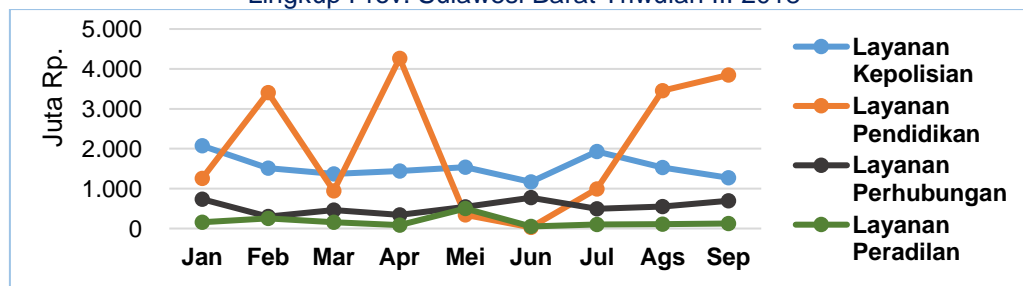


Sumber: OMSPAN (diolah)

2.1.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Sulbar sampai dengan akhir triwulan III mencapai Rp44,03 miliar atau meningkat sebesar 14,17 persen (yoy). Sama dengan periode sebelumnya, penyumbang terbesar PNBP Sulbar berasal dari kelompok pendapatan jasa Layanan Kepolisian, Pendidikan, Perhubungan, dan Peradilan. Penerimaan PNBP tertinggi pada triwulan III 2018 tercatat pada September yang bersumber dari penerimaan Layanan Jasa Pendidikan. Hal tersebut selaras dengan kondisi dimana Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Kabupaten Majene yang berpredikat sebagai satker dengan kontribusi penerimaan PNBP tertinggi sebesar 34,89 persen dari total PNBP Provinsi Sulbar.

Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan PNBP dari Empat Jenis PNBP Terbesar per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan III 2018



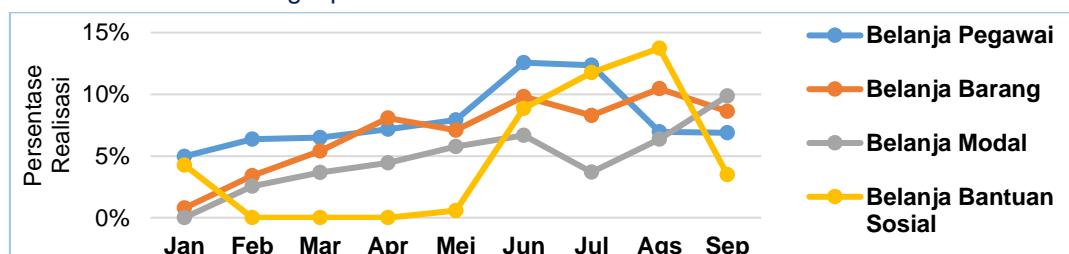
Sumber: OMSPAN (diolah)

Pendapatan Jasa Peradilan mengalami peningkatan tipis pada September yang berasal dari penambahan pendapatan denda pelanggaran lalu lintas. Realisasi pendapatan Layanan Perhubungan mengalami akselerasi sepanjang periode triwulan III 2018 dan mencapai puncak pada September 2018. Kondisi tersebut berkorelasi dengan data BPS Provinsi Sulbar yang merilis peningkatan frekuensi pelayaran sebesar 46,89 persen pada bulan tersebut. Sebaliknya, realisasi PNBP dari Jasa Layanan Kepolisian mengalami penurunan sehubungan dengan berkurangnya jumlah SIM yang diterbitkan oleh pihak berwenang rata-rata 31,21 persen per bulan sepanjang triwulan III 2018.

2.2 Belanja Negara

2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2.5 Tren Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018

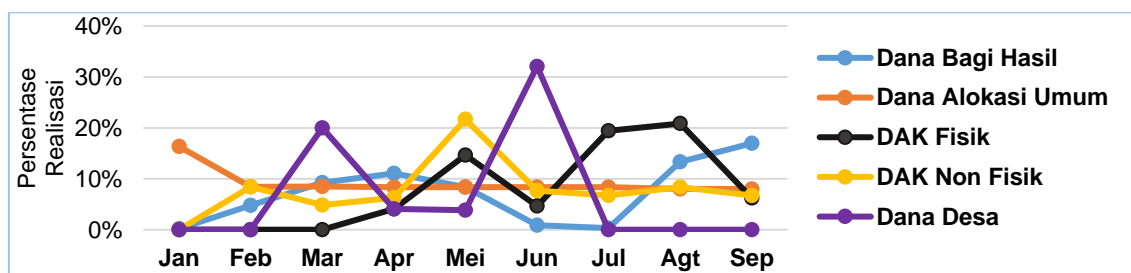


Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Sampai dengan akhir September 2018, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 57,32 persen atau tumbuh sebesar 7,83 persen (yoy). Belanja Bantuan Sosial menunjukkan akselerasi tertinggi sebesar Rp0,7 miliar (c-to-c) sehubungan dengan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Rehabilitasi Sosial Warga Usia Lanjut. Sementara itu, Belanja Barang mengalami akselerasi pada Agustus 2018 sebesar Rp30,34 miliar dengan adanya kegiatan penerapan budidaya jagung, kedelai, dan sereal lainya, serta peningkatan kualitas rumah swadaya. Di sisi lain, realisasi Belanja Pegawai triwulan III 2018 mengalami kontraksi sebesar -5,24 persen (q to q) sehubungan kembali normalnya pembayaran gaji PNS pasca periode hari raya Idul Fitri.

2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik 2.6 Tren Persentase Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018



Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Realisasi Belanja TKDD di Provinsi Sulbar sampai dengan akhir September 2018 sebesar Rp5,17 triliun atau 78,14 persen dari pagu TKDD. Tumbuh sebesar 4,65 persen (yoy) didorong oleh laju realisasi DAK Fisik yang meningkat pada Juli dan Agustus 2018 sehubungan penyaluran DAK Fisik Tahap II. Sementara itu, penyaluran Dana Desa (DD) pada triwulan III 2018 bernilai nihil mengingat belum ada satupun pemda yang mengajukan penyaluran DD Tahap III. Pemda lingkup Sulbar belum memenuhi persyaratan penyaluran DD Tahap III yakni Laporan Realisasi Penyaluran DD sampai dengan Tahap II minimal 75 persen, Laporan Konsolidasi Penyerapan paling kurang 75 persen, dan rata-rata capaian output minimal 50 persen.

2.2.3 Satuan Kerja yang Berpotensi Menjadi BLU

Hingga akhir triwulan III 2018, belum ada satker pengelola APBN di lingkup Sulbar yang berstatus sebagai satker BLU. Namun demikian, terdapat dua satker pengelola PNBPN yang terus menunjukkan potensinya untuk menjadi satker BLU jika dilihat dari nilai aset dan PNBPN yang dikelola, yaitu Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) yang berlokasi di Majene dan Poltekkes Mamuju. Sampai akhir September 2018, nilai aset Unsulbar dan Poltekkes Mamuju mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan nilai aset Unsulbar didominasi oleh aset Tanah yang bertambah nilainya sebesar Rp30,63 miliar atau 82,46 persen (yoy). Sementara itu, penambahan nilai aset Poltekkes Mamuju didominasi oleh peningkatan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp6,34 miliar atau 101,69 persen (yoy). Pengadaan peralatan pendukung laboratorium praktek memberikan kontribusi terbesar atas peningkatan nilai kelompok aset tersebut.

Di sisi lain, realisasi penerimaan PNBPN kedua satker tersebut sampai dengan triwulan III 2018 turut mengalami akselerasi. Realisasi penerimaan dari Pendapatan Biaya Pendidikan menjadi penyumbang utama kenaikan tersebut. Pembangunan ruang kelas di Unsulbar dan Poltekkes Mamuju terbukti mampu meningkatkan jumlah kuota mahasiswa yang pada akhirnya mendorong penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan masing-masing sebesar 59,82 persen (yoy) dan 76,34 persen (yoy). Dengan kenaikan nilai aset dan penerimaan PNBPN yang dikelola, kedua satker tersebut semakin memiliki modal untuk merubah status menjadi satker BLU di masa mendatang.

Tabel 2.2 Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker pengguna PNBPN periode Triwulan III tahun 2017 – 2018 (dalam juta Rp.)

Nama Satker	Aset			PNBPN		
	TW III 2017	TW III 2018	Per-tumbuhan	TW III 2017	TW III 2018	Per-tumbuhan
Unsulbar	96.297,77	133.125,19	38,24%	9.495,82	14.994,63	57,91%
Poltekkes Mamuju	60.628,80	75.557,47	24,62%	2.610,75	2.723,43	4,32%

Sumber: Monev PA (diakses 11 November 2018); Laporan BMN pada Neraca Satker (diolah)

2.2.4 Manajemen Investasi Pusat

2.2.4.1 Penerusan Pinjaman

Loan Agreement dari semua debitur di wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar telah berstatus lunas sejak 31 Desember 2017. Namun, penutupan pinjaman oleh pemkab Polman dengan Nomor Pinjaman SLA-1047/DP3/1998 baru selesai diproses pada tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandai dengan penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-6616/Mk.5/2018 perihal penutupan perjanjian penerusan pinjaman dimaksud.

2.2.4.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sampai dengan akhir September 2018, penyaluran KUR di Provinsi Sulbar masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi 46,62 persen dari total penyaluran KUR. Sementara itu, jumlah debitur pada Sektor Pertanian mencapai 28,47 persen dari total debitur KUR, tertinggal dari sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki porsi 57,5 persen. Hal ini menjadi ironi di tengah data BPS yang menempatkan sektor tersebut sebagai kontributor PDRB terbesar di Sulbar. Persyaratan tambahan berupa agunan untuk mengatasi tingkat pengembalian yang relatif rendah disinyalir menjadi penyebab rendahnya jumlah debitur di sektor Pertanian.

Tabel 2.3 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018

Sektor Ekonomi	KUR			Rata-rata per debitur (Juta Rp)
	Akad (Juta Rp)	Outstanding (Juta Rp)	Debitur (Org/ Kelompok Usaha)	
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	257.731,50	211.703,53	5.808	44,38
Perikanan	5.989,00	4.636,15	248	24,15
Industri Pengolahan	23.518,00	18.227,99	857	27,44
Perdagangan Besar dan Eceran	297.557,98	240.974,82	11.730	25,37
Penyediaan Akomodasi dan Makanan	12.131,50	10.216,78	169	83,03
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4.774,00	3.860,13	219	21,80
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	3.971,00	2.429,40	47	84,49
Jasa Kemasyarakatan, sosbud, dan Hiburan	32.548,90	25.530,22	1.318	24,70
Total	638.221,88	517.579,02	20.396	

Sumber: SIKP (diolah, diakses pada tanggal 30 September 2018)

2.3 Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.4 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rp.)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan s.d. Triwulan IV	
		Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	775,01	398,63	51,44%	662,25	85,45%
Belanja Negara	10.189,01	7.218,67	70,85%	9.909,83	97,26%
Surplus/Defisit	(9.414,00)	(6.820,04)		(9.247,58)	

Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Keterangan: (*) dihitung berdasarkan rata-rata tren realisasi dalam tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2017, realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sulbar sampai dengan triwulan III hanya sebesar 42 persen, sedangkan hingga akhir tahun terserap sebesar 75 persen. Artinya, dalam satu kuartal terakhir realisasi pendapatan terakselerasi sebesar 33 persen. Sementara itu, progres realisasi Pendapatan Negara sampai dengan triwulan III 2018 telah mencapai 51,44 persen, dengan jumlah target pendapatan yang lebih kecil. Lebih lanjut, dengan tingginya kontribusi realisasi Pendapatan Perpajakan dari sektor Belanja Pemerintah, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Negara pada akhir kuartal IV dapat mencapai 85,45 persen.

Proyeksi tersebut berkorelasi dengan masih adanya sisa anggaran Belanja Pemerintah yang belum terealisasi sebesar 30 persen dari pagu yang potensial sebagai objek pengenaan pajak. Selain itu, prediksi meningkatnya realisasi Pendapatan Negara juga bersumber dari adanya perbaikan kinerja pada sektor Industri Pengolahan di wilayah Sulbar. Sementara pada sisi lain, pagu Belanja Negara diperkirakan mampu terserap hingga 97,26 persen berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan juga dengan memperhatikan progres realisasi penyaluran DAK Fisik yang lebih baik.

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi s.d. Tw III	Pagu	Realisasi s.d. Tw III
PENDAPATAN				
PAD	703.272	335.560	858.145	414.546
Pajak Daerah	317.838	148.378	359.877	231.417
Retribusi Daerah	97.340	49.327	101.146	45.012
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	23.961	23.132	27.586	22.882
Lain-Lain PAD yang Sah	264.132	114.723	369.536	115.235
Pendapatan Transfer	6.263.629	4.805.755	6.324.122	4.933.676
Dana Perimbangan	5.892.017	4.592.956	5.981.838	4.653.631
Dana Bagi Hasil	123.885	83.519	100.380	63.194
Dana Alokasi Umum	4.200.107	3.549.440	4.224.888	3.448.003
Dana Alokasi Khusus Fisik	870.045	517.011	839.034	586.876
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	697.979	442.986	817.536	555.558
Non Dana Perimbangan	166.173	140.721	190.301	172.500
Transfer Dana Lainnya	166.173	140.721	190.301	172.500
Transfer Pemerintah Daerah	205.439	72.078	151.984	107.545
Bagi Hasil Pajak	180.239	59.278	138.534	94.070
Transfer Lainnya	25.200	12.800	13.450	13.475
Dana Desa	461.095	276.381	472.772	283.127
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	64.914	11.326	58.796	1.203
Pendapatan Hibah	11.618	9.909	13.200	243
Pendapatan Lainnya	53.296	1.417	45.596	960
JUMLAH PENDAPATAN	7.492.910	5.429.023	7.713.835	5.632.552
BELANJA DAERAH				
Belanja Pegawai	2.585.089	1.759.024	2.707.314	1.901.096
Belanja Barang	1.738.170	875.710	1.965.608	930.920
Belanja Bunga	8.959	7.978	28.333	13.589
Belanja Hibah	429.522	288.744	396.762	276.630
Belanja Bantuan Sosial	64.538	47.787	32.725	23.322
Belanja Modal	2.088.222	1.028.911	1.868.686	840.545
Belanja Tidak Terduga	9.960	481	13.021	872
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH				
Transfer Dana Desa	461.095	268.758	472.268	276.567
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda/Desa	287.773	131.797	265.688	169.142
Transfer Bagi Hasil Pajak	128.954	68.519	147.764	107.941
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.622	2.102	46.459	20.692
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.806.905	4.479.811	7.944.628	4.561.316
SURPLUS/DEFISIT	(313.996)	949.211	(230.793)	1.071.235

Sumber: BPKAD lingkup Sulbar, <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id> (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan III meningkat Rp205,3 miliar atau 3,75 persen (yoy). Meskipun demikian, tingkat rasio kemandirian daerah masih sangat rendah sekitar 7,94 persen. Pengembangan potensi dan perbaikan pengelolaan sektor pariwisata dan UMKM diharapkan mampu mengakselerasi PAD untuk menguatkan kemandirian daerah.

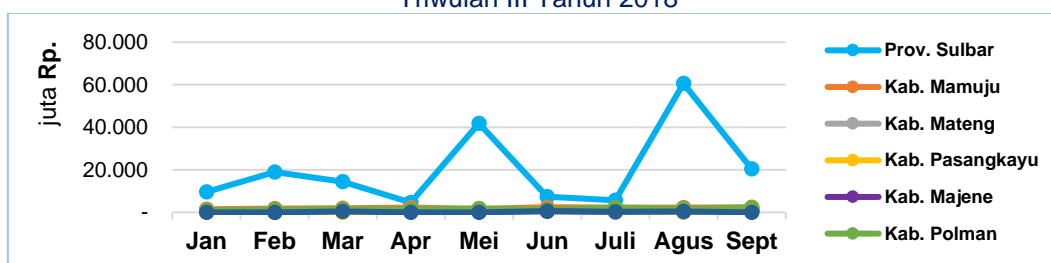
Realisasi belanja daerah mengalami sedikit penurunan Rp21,6 miliar atau 0,54 persen (yoy) yang dipicu oleh lambatnya serapan Belanja Modal. Sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengurangi tingginya rasionalisasi perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan kegiatan. Kemudian koordinasi dan evaluasi percepatan penuntasan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDesa dan bagi hasil pajak mendorong peningkatan realisasi transfer pemda Rp103,2 miliar atau 21,90 persen.

3.1 Pendapatan Daerah

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

3.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018

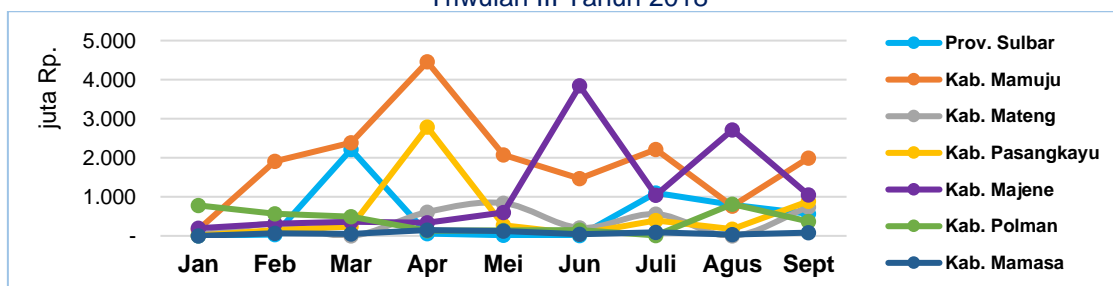


Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar (diolah)

Pemprov Sulbar memberikan kontribusi terbesar yakni 79,41 persen dari total realisasi pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Pemprov Sulbar pada Agustus 2018 didorong oleh penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp23,9 miliar atau naik 80,72% (*m to m*). Di sisi lain, momentum tumbuhnya industri akomodasi dan makanan minuman hingga Rp26 miliar diharapkan dapat dioptimalkan oleh pemda untuk mendongkrak penerimaan pajak daerah di tingkat kabupaten yang realisasinya relatif stagnan.

3.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018



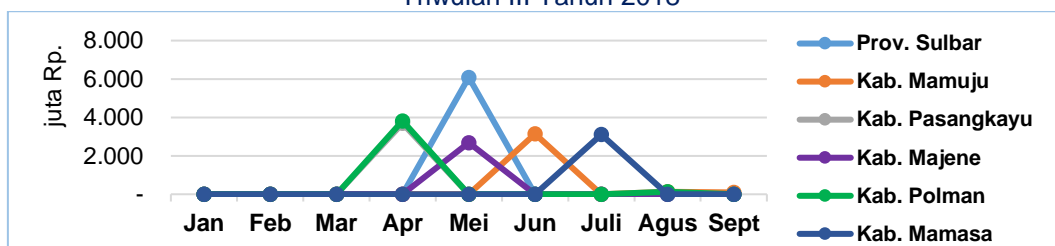
Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar (diolah)

Primadona penerimaan retribusi di Sulbar adalah sektor pelayanan kesehatan yang mengalami peningkatan hingga 51,67 persen pada bulan Agustus 2018 di Pemkab Majene. Selain itu, optimalisasi penerimaan dari sektor potensial lainnya dapat

diupayakan antara lain dari sektor pariwisata melalui perbaikan akses dan fasilitas umum objek wisata yang diiringi perbaikan tata kelola berkesinambungan. Lebih lanjut, optimalisasi retribusi dari sektor layanan parkir dengan menertibkan parkir liar di tempat publik antara lain anjungan pantai, *cafe*, dan rumah-rumah makan.

3.1.1.3 Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HKDYD)

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan HKDYD Kabupaten Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018



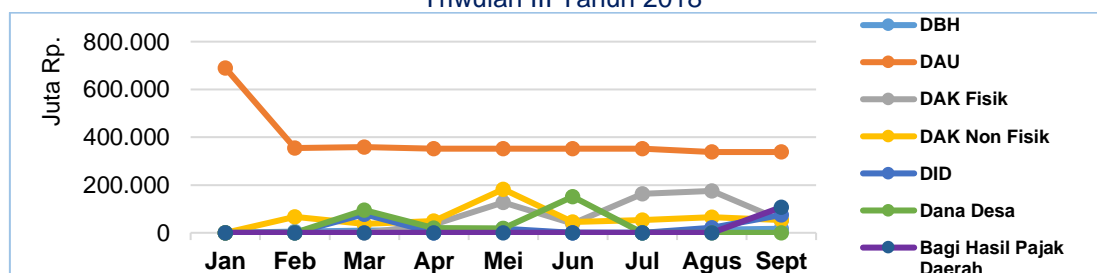
Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar (diolah)

Catatan : Pemkab. Mamuju Tengah (Mateng) tidak menetapkan target penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HKDYD) sejak terbentuk Kabupaten dari pemekaran daerah baru pada 2014.

Pada Juli 2018, Pemkab Mamasa baru menerima realisasi HKDYD sebesar Rp3,1 miliar dari bagi hasil laba atas penyertaan modal pada BPD Sulselbar. Di sisi lain, berdasarkan hasil audit BPK, pengelolaan dana bergulir dan penyertaan modal di perusda belum cukup efektif dan efisien. Diperlukan langkah besar untuk kembali “menyehatkan perusda” diantaranya dengan re-organisasi, *job redesign*, dan kemampuan mengaitkan strategi bisnis dengan strategi SDM yang profesional.

3.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 3.4 Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2018



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar (diolah)

Pada Juli 2018 penyaluran DAK Fisik terealisasi Rp163,2 miliar atau naik 319,04 persen dan kembali terakselerasi sebesar 7,46 persen pada bulan berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara BPKAD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Pemkab Mamuju yang mencatatkan realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi sebesar Rp121,9 miliar. Sementara itu, realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak pemda terealisasi sebesar Rp107,5 miliar yang bersumber dari transfer

bagi hasil rokok Rp53,6 miliar dan penerimaan PAD pajak kendaraan bermotor, BBNKB serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan total Rp129,9 miliar.

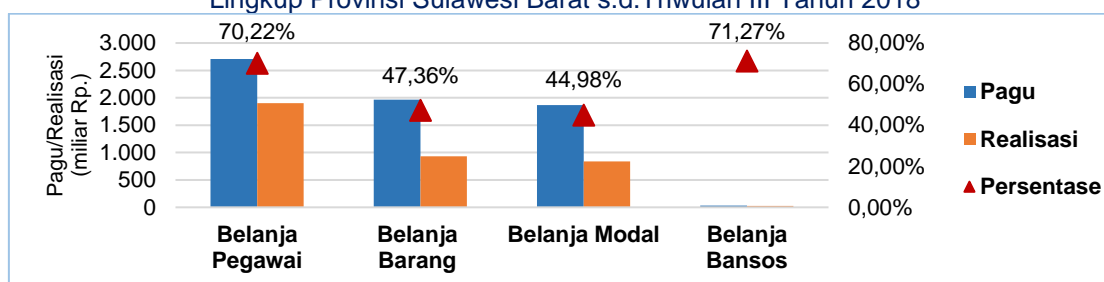
3.1.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1,2 miliar bersumber dari Pendapatan Hibah dari Badan Lembaga Organisasi Swasta PT. Asuransi Jasa Raharja senilai Rp243 juta, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) senilai Rp914,3 juta, dan pendapatan lainnya senilai Rp45,7 juta.

3.2 Belanja Daerah

3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d.Triwulan III Tahun 2018



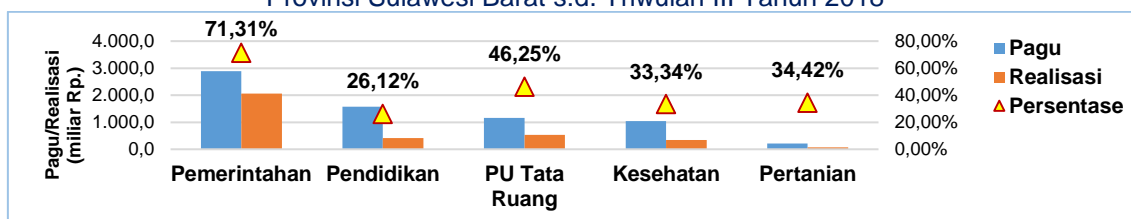
Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar (diolah)

Rendahnya penyerapan Belanja Barang dan Belanja Modal di Sulbar setidaknya berkorelasi dengan faktor-faktor berikut:

- Perencanaan program dan proyek pemerintah daerah yang kurang matang sehingga sering dilakukan revisi anggaran. Diharapkan penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan valid dan akuntabel serta didukung dengan sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai.
- Proses persetujuan anggaran terlalu lama sehingga berdampak pada keterlambatan pengesahan APBD. Diharapkan pembahasan anggaran dan rincian alokasi anggaran dapat diselesaikan pada bulan Desember agar Januari tahun berikutnya setiap OPD dapat memulai pelaksanaan program kerja.
- Proses tender yang lambat berdampak pada tersendatnya pelaksanaan proyek. Diharapkan proses lelang kegiatan tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan lebih cepat yakni pada akhir tahun anggaran berjalan.
- Keterlambatan pencairan Uang Persediaan (UP) pada Maret-April 2018 dan kurangnya intensitas Bendahara Pengeluaran melakukan Penggantian Uang Persediaan (GUP). Bendahara Pengeluaran dapat bersinergi dengan Pejabat Penanggung jawab Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam POK.

3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan III Tahun 2018



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar; SIKD (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, penyerapan anggaran pada kelima belanja urusan terbesar masih tergolong cukup rendah. Beberapa komponen belanja turut andil menjadi penyebab lambatnya penyerapan, diantaranya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang baru terealisasi Rp448,2 miliar atau 46,22 persen dari pagu anggaran. Dipastikan akan terjadi lonjakan penyerapan di akhir tahun seiring jatuh tempo pengerjaan sejumlah proyek pembangunan/perbaikan/peningkatan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Percepatan proses tender untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya di akhir tahun anggaran berjalan diharapkan dapat meminimalisir seretnya penyerapan belanja daerah secara umum sampai dengan triwulan III 2018.

3.3 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d.Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d.Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	7.713.835	5.632.552	73,02%	7.528.008	97,59%
Belanja Daerah	7.944.628	4.561.316	57,41%	7.290.785	91,77%
Surplus/Defisit	(230.793)	1.071.235		237.223	

Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar, Kanwil DJPB Prov. Sulbar (diolah)

Berdasarkan kondisi saat ini yang ditandai dengan rendahnya penyerapan, diproyeksikan akan terjadi lonjakan realisasi APBD pada triwulan IV 2018. Dengan kondisi tingkat penyerapan Belanja Daerah kurang dari 60 persen, maka besar kemungkinan penyerapan Belanja Daerah di 2018 berpotensi lebih rendah dari penyerapan 2017 yang terealisasi sebesar 92,41 persen dari total pagu belanja. Sebaliknya, Pendapatan Daerah diprediksi cenderung akan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan capaian realisasi Pendapatan Daerah yang relatif sama dengan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan tersebut juga terkonfirmasi dengan estimasi realisasi penerimaan DAK Fisik tahun 2018 sebesar 98,44 persen sebagaimana tertera dalam daftar kontrak kegiatan. Angka perkiraan tersebut akan melampaui realisasi penerimaan DAK Fisik tahun 2017 yang hanya mencapai 95,09 persen dari total pagu.

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan III Tahun 2018 (dalam Juta Rp.)

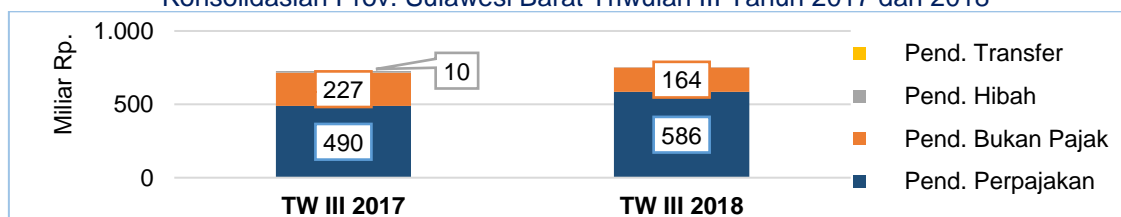
Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	398.628	5.525.007	750.485	3,28%	726.666
Pendapatan Perpajakan	354.598	231.417	586.015	19,70%	489.588
Pendapatan Bukan Pajak	44.030	184.089	164.228	(27,71%)	227.169
Hibah	0	243	243	(97,55%)	9.909
Transfer	0	5.109.258	0	0%	0
Belanja Negara	7.584.393	4.435.745	6.846.988	10%	6.237.755
Belanja Pemerintah	2.411.243	3.986.973	6.398.217	8,34%	5.905.595
Transfer	5.173.149	448.772	448.772	35,11%	332.160
Surplus/(Defisit)	(7.185.765)	1.089.262	(6.096.503)	10,62%	(5.511.089)
Pembiayaan	0	(13.217)	(13.217)	(121,30%)	62.039
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	8.611	8.611	(88,14%)	72.588
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	21.828	21.828	106,91%	10.549
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	(7.185.765)	1.076.045	(6.109.720)	12,12%	(5.449.050)

Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; LKPD pemda lingkup Sulbar (diolah)
Keterangan: *) Seluruh Belanja Transfer Pempus dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemda.

4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

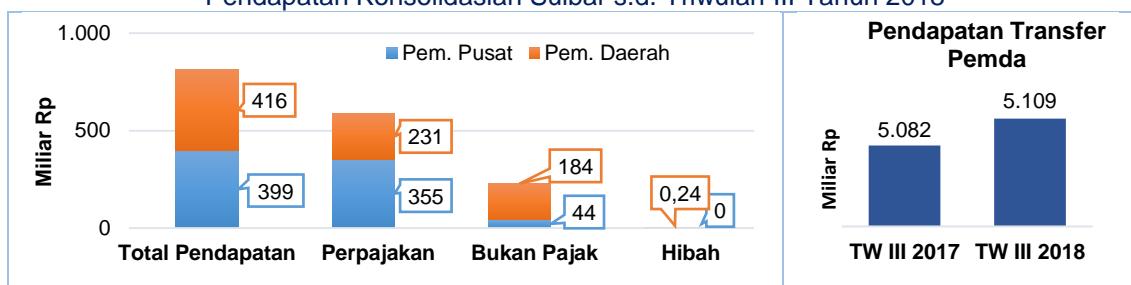
Grafik 4.1 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2017 dan 2018



Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kontraksi yang terjadi pada jenis pendapatan PNBPN dan Hibah masih dapat di-cover oleh ekspansi Pendapatan Perpajakan. Sumber pertumbuhan pendapatan perpajakan Sulbar yang relatif besar berasal dari penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi. Sementara itu, untuk komposisi Pendapatan Perpajakan masih didominasi oleh PPh dan PPN dari penerimaan pemerintah pusat. Di sisi lain, penurunan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kurang lebih Rp4 miliar memberi andil besar terhadap kontraksi pendapatan PNBPN secara keseluruhan.

Grafik 4.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Sulbar s.d. Triwulan III Tahun 2018



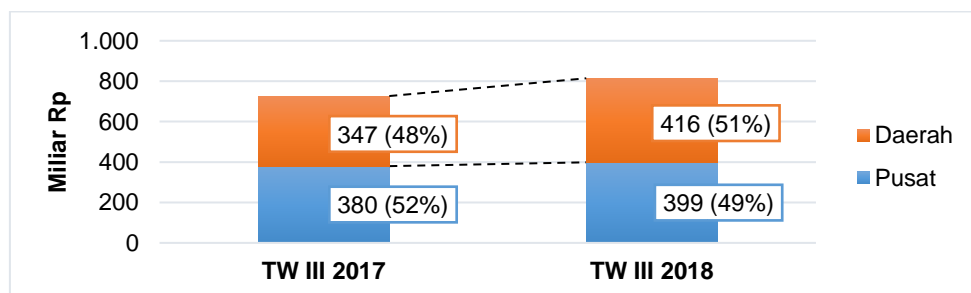
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Secara agregat kontribusi penerimaan pemerintah daerah terhadap Realisasi Pendapatan Konsolidasian terpaut dua persen lebih besar dari penerimaan pemerintah pusat. Dominasi pemerintah daerah masih terlihat pada jenis pendapatan PNBPN, yang ditopang oleh penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, Pendapatan Perpajakan, mayoritas masih berasal dari pemerintah pusat yakni dari PPh dan PPN. Walaupun Pendapatan Perpajakan pemerintah daerah perlahan tumbuh, namun perlu menjadi perhatian bahwa sumber pertumbuhan berasal dari Pajak Rokok yang pada dasarnya kontraproduktif dengan program Gerakan Masyarakat Sehat.

Lebih lanjut, geliat UMKM terutama pada industri makanan siap saji nampaknya belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah untuk menjadi sumber penerimaan pajak. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah adanya kekhawatiran akan menjadi disinsentif bagi pertumbuhan sektor dimaksud. Sementara itu pada sisi Pendapatan Transfer, terjadi kenaikan yang didorong oleh peningkatan jumlah realisasi DAK Non Fisik sebesar kurang lebih Rp100 miliar dan penambahan realisasi pada beberapa pos penerimaan yang lain. Akan tetapi, penurunan pada beberapa pos seperti Dana Alokasi Umum (DAU) menyebabkan secara agregat penambahan pada pendapatan transfer hanya sebesar Rp27 miliar.

4.2.2 Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perubahan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Sulbar (selain Transfer) Triwulan III 2017-2018



Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; LKPD lingkup Sulbar (data diolah)

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mengalami penguatan. Penguatan pemerintah daerah dalam meraup pendapatan perlahan menggerus dominasi pemerintah pusat. Pengurangan realisasi Retribusi Daerah yang menyebabkan menurunnya realisasi PNBPN Pemerintah daerah diduga berkorelasi dengan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Perekonomian Sulbar yang tumbuh lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari 6,69 persen menjadi 6,74 persen mengindikasikan volume aktivitas ekonomi yang semakin besar. Kenaikan dimaksud seyogyanya menjadi salah satu indikator semakin luasnya kesempatan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan. Apabila dilihat sekilas, kesempatan dimaksud berhasil dimanfaatkan oleh pemerintah Sulbar dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada Pendapatan Perpajakan. Namun, peningkatan tersebut juga dipengaruhi secara kontraproduktif oleh penurunan realisasi PNBPN, sehingga pertumbuhan Pendapatan Perpajakan dan PNBPN konsolidasian hanya sebesar 4,67 persen.

Tabel 4.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK dengan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulbar Triwulan III 2017-2018 (Realisasi dalam Miliar Rp.)

Uraian	TW III 2017		TW III 2018	
	Realisasi	Pertumbuhan (c-to-c)	Realisasi	Pertumbuhan (c-to-c)
Pendapatan Perpajakan	489,59	-17,49%	586,01	19,70%
PNBPN	227,17	12,48%	164,23	-27,71%
Total Pend.Pajak + PNBPN	716,76	-9,88%	750,24	4,67%
PDRB ADHK	21.480,00	6,69%	22.923,00	6,74%

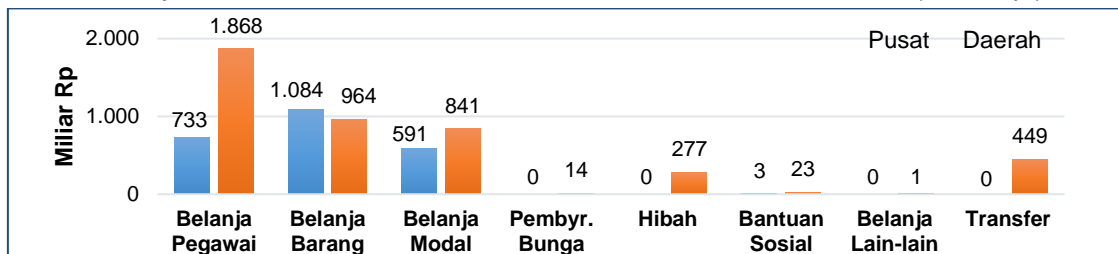
Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Prov. Sulbar (diolah)

Adanya celah antara pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Konsolidasian sebesar 2,07 persen dapat mengindikasikan bahwa eksplorasi potensi pendapatan Sulbar masih belum optimal. Terlebih lagi, peningkatan penerimaan perpajakan pada pemda didorong oleh penerimaan Pajak Rokok, yang berlawanan dengan program kesehatan. Dari tabel di atas tampak pula bahwa penerimaan dari PNBPN sedang mengalami kelesuan. Mengingat salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS, maka pemerintah Sulbar perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan BPJS sebagai upaya preventif terhadap kondisi serupa. Selain itu, profesionalitas pengelolaan BUMD atau perusahaan daerah perlu ditingkatkan agar realisasi pendapatan Sulbar dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meningkat.

4.3 Belanja Konsolidasian

4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan III 2018 (miliar Rp.)

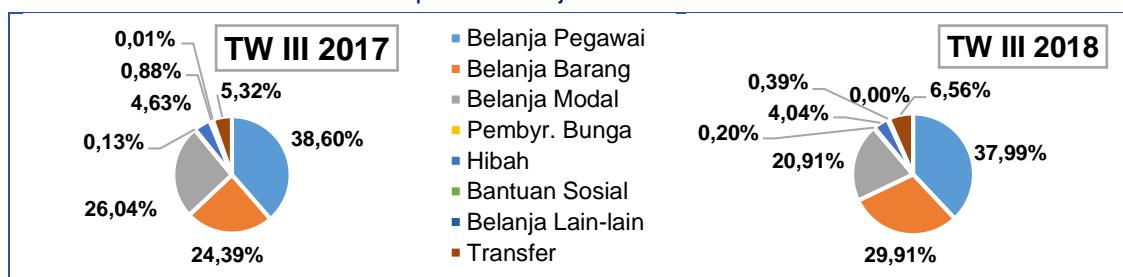


Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Belanja Pemerintah Daerah mendominasi sebesar 62 persen dari total Belanja Konsolidasian Sulbar. Dominasi Belanja Pemerintah Pusat hanya terjadi pada jenis Belanja Barang. Pada periode ini, kinerja realisasi Belanja Modal terlihat relatif lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut berhubungan dengan telah selesainya beberapa proyek besar seperti pembangunan Jalan Arteri dan pembangunan gedung dan sarpras Polda Sulbar. Beberapa proyek besar yang masih berjalan seperti pembangunan *runway* Bandara Tampa Padang sampai dengan triwulan III 2018 menunjukkan realisasi yang belum optimal. Hal tersebut berhubungan dengan termin pembayaran yang tiba pada akhir tahun anggaran. Sementara pada sisi pemerintah daerah, kinerja penyaluran DAK Fisik Sulbar yang menduduki peringkat kedua pada skala nasional turut andil terhadap tingginya realisasi Belanja Modal pemerintah daerah.

4.3.2 Analisis Perubahan

Grafik 4.5 Perubahan Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Prov. Sulbar



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah); OMSPAN; dan LKPD Pemda lingkup Sulbar

Ekspansi pada Belanja Barang mengurangi dominasi Belanja Pegawai, meskipun secara absolut jumlah Belanja Pegawai pada periode ini mengalami kenaikan drastis sebesar 35 persen (*yoy*) dari Rp1,5 triliun menjadi Rp2 triliun. Pada periode ini, salah satu realisasi belanja yang diperkirakan mendorong kenaikan Belanja Barang adalah belanja yang berhubungan dengan Tahapan Pemilihan Umum yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp90 miliar. Sementara itu pada jenis Belanja Modal, selain

karena adanya perubahan jumlah pagu anggaran seiring telah selesainya proyek nasional, lambatnya eksekusi belanja kontraktual disinyalir turut menjadi salah satu kendala percepatan realisasi. Kontraksi pada Belanja Modal tersebut patut diduga menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat perkotaan, sehingga berimbas pada angka TPT perkotaan yang melonjak dibandingkan tahun lalu.

4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

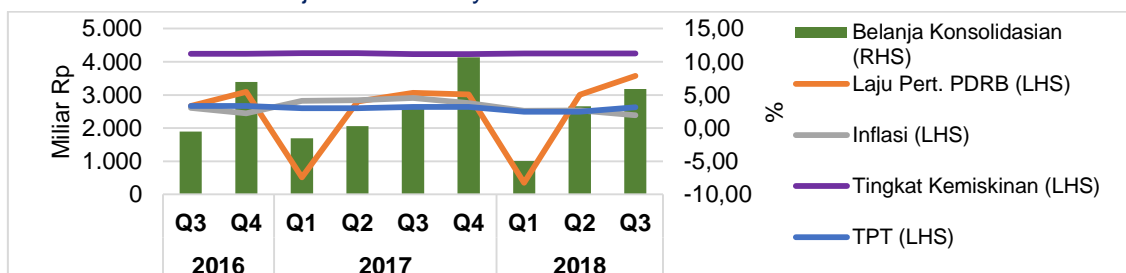
Sampai dengan akhir Triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi regional Sulbar per kuartal menunjukkan tren positif, yakni rata-rata sebesar 0,5 persen (*c-to-c*) dan satu persen (*yoy*). Akselerasi Belanja Pemerintah diperkirakan mampu menggiring laju pertumbuhan tersebut pada titik klimaks di kuartal IV mengingat masih terdapat 40 persen sisa anggaran. Beberapa dampak kebijakan fiskal sampai dengan triwulan III 2018 terhadap indikator ekonomi regional Sulbar, antara lain:

- a. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai 8,03 persen (*yoy*) berkontribusi terhadap besarnya nilai Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan kontributor terbesar PDRB Sulbar (48 persen). Peningkatan tersebut dapat menahan penurunan volume Konsumsi RT sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp15 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan realisasi Belanja Pegawai mampu menjadi kebijakan fiskal yang efektif untuk mengendalikan tren penurunan Konsumsi RT di tahun 2018.
- b. Realisasi transfer Dana Desa menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya, dari Rp145 miliar di tahun 2015 menjadi sebesar Rp283 miliar sampai dengan triwulan III 2018. Pada periode yang sama, tren jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang signifikan sebesar 12.070 orang dari 133.090 pada Maret 2015 menjadi 121.020 pada Maret 2018.
- c. Tren realisasi Dana Desa tersebut juga berkorelasi dengan penurunan angka pengangguran di perdesaan. Data BPS Provinsi Sulbar menunjukkan bahwa TPT Perdesaan menurun 0,46 basis poin (*yoy*) dari 2,89 persen menjadi 2,43 persen. Penurunan tersebut diperkirakan berhubungan dengan adanya kebijakan *Cash For Work* yang mewajibkan setiap desa mengalokasikan dana minimal 30 persen untuk program Padat Karya Tunai. Program dimaksud mengharuskan penggunaan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerjanya, sehingga dipercaya memiliki andil besar terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah perdesaan.
- d. Sampai dengan triwulan III 2018 Tingkat penyerapan belanja pada Fungsi Pendidikan masih rendah (penyerapan dari dana APBD 24 persen dan APBN 53

persen). Berdasarkan angka tersebut, maka diperkirakan capaian IPM Sulbar untuk tahun 2018 akan terealisasi di bawah target sebesar 66,62.

- e. Realisasi belanja pada Fungsi Kesehatan yang hingga akhir Triwulan III 2018 baru terserap 33 persen dari dana APBD dan 47 persen dari APBN. Kondisi ini juga diperkirakan menghambat laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup Sulbar yang pada tahun 2017 hanya tumbuh 0,05 persen (yoy).
- f. Secara keseluruhan, Belanja Pemerintah dan Transfer tercatat mengalami kenaikan 10 persen (yoy). Peningkatan tersebut berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6,74 persen (c-to-c).

Grafik 4.6 Hubungan Belanja Pemerintah Konsolidasian dengan beberapa Indikator Kesejahteraan Masyarakat Sulbar s.d. Triwulan III 2018



Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Provinsi Sulbar (data diolah)

4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB

Tabel 4.3 Kontribusi Belanja Operasional dan Modal Konsolidasian terhadap PDRB (ADHB) Prov. Sulbar s.d. Triwulan III 2018 (miliar Rp.)

Uraian	Jumlah	PDRB	Kontribusi
Belanja Operasional	5.414	32.052	16,89%
Belanja Modal	1.432	32.052	4,47%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Berdasarkan perbandingan besaran realisasi Belanja Pemerintah terhadap jumlah PDRB ADHB Sulbar, diketahui bahwa Belanja Pemerintah berkontribusi sebesar 17

persen, sedangkan kontribusi investasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Belanja Modal adalah sebesar empat persen. Besarnya kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan PDRB pada kuartal selanjutnya. Hal tersebut sangat potensial mengingat masih tersedianya sisa anggaran yang siap diserap sebesar 40 persen.

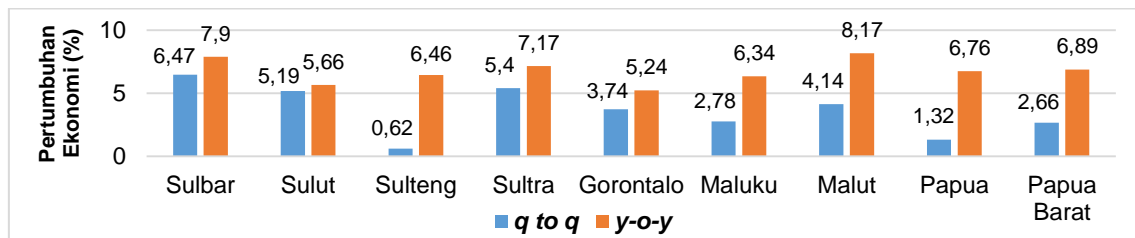
Dengan demikian, diharapkan optimalisasi realisasi Belanja Pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target tahun 2018 sebesar 7,1 persen. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antar *stakeholders* untuk memastikan kinerja penyerapan anggaran dapat tercapai minimal 94,85 persen. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi agar inflasi yang biasanya mengalami kenaikan menjelang akhir tahun anggaran dapat dikendalikan pada laju yang optimal bagi denyut perekonomian Sulbar.

BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

5.1 Optimalisasi Kebijakan Fiskal untuk Memangkas Kesenjangan Ekonomi Antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Pertumbuhan ekonomi Sulbar mencatatkan capaian positif pada periode triwulan III 2018. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Sulawesi Barat (2018), pertumbuhan ekonomi di Sulbar menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di kawasan regional Sulampua (Sulawesi Maluku Papua) dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,47 persen (*q to q*). Jika ditilik dari komparasi secara tahunan (*y-o-y*), pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulbar pada triwulan III 2018 sebesar 7,90 persen, kedua tertinggi di wilayah Sulampua setelah Provinsi Maluku Utara sebesar 8,17 persen. Kinerja tersebut akan semakin baik apabila PDRB di tingkat provinsi diperoleh dari kontribusi merata dari seluruh kabupaten.

Grafik 5.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Sulampua *q to q* dan *yoy* Triwulan III 2018



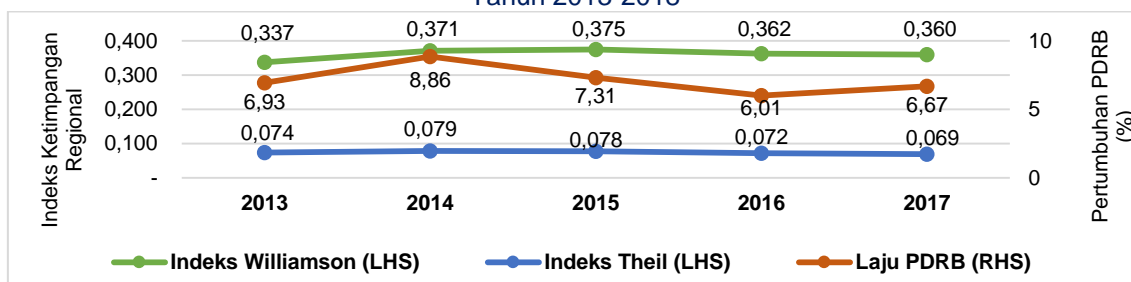
Sumber: BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Untuk mengetahui tingkat pemerataan maupun kesenjangan PDRB regional, terdapat dua indeks ketimpangan yang dapat digunakan yaitu Indeks *Williamson* dan Indeks *Theil* (Kuncoro, 2010). Indeks *Williamson* menggunakan PDRB per Kapita sebagai basis perbandingan ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam suatu wilayah acuan yang lebih luas. Sementara itu, Indeks *Theil* meskipun menggunakan dasar perhitungan yang sama yakni PDRB per Kapita, memiliki keunggulan dibandingkan dengan Indeks *Williamson* yakni kemampuan menghitung ketimpangan dalam daerah (intra) maupun antardaerah (inter) secara sekaligus (Sjafrizal, 2014). Menggunakan indeks tersebut, suatu daerah mengalami ketimpangan distribusi pendapatan di sub wilayahnya jika indeks mendekati nilai 1. Sebaliknya, distribusi pendapatan regional merata sempurna apabila hasil pengukuran mendekati nilai 0.

Berdasarkan data PDRB per kabupaten di wilayah Provinsi Sulbar periode tahun 2013 sampai dengan 2018, pengukuran menggunakan indeks *Williamson* dan *Theil* menghasilkan nilai rata-rata masing-masing sebesar 0,361 dan 0,074. Sehingga dapat diartikan bahwa kesenjangan ekonomi antardaerah di Provinsi Sulbar termasuk dalam

kategori rendah. Hal tersebut tentunya memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati relatif merata oleh masing-masing kabupaten di lingkup Sulbar. Namun demikian, terdapat kondisi yang menarik dimana ketimpangan ekonomi antarkabupaten di Sulbar semakin melebar saat terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana nampak pada Grafik 5.2 di atas. Sebaliknya, pada saat laju perekonomian menunjukkan tren melambat, kesenjangan ekonomi antarkabupaten terlihat lebih merata (indeks *Williamson* dan *Theil* semakin mendekati nilai 0).

Grafik 5.2 Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional dan Laju PDRB Provinsi Sulbar Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Hal tersebut menunjukkan bahwa saat perekonomian Sulbar melaju positif, belum diikuti secara linear oleh pemerataan distribusi pendapatan di seluruh kabupaten. Hal tersebut berkorelasi dengan konsentrasi kegiatan ekonomi serta sebaran demografi yang secara umum berada di kabupaten-kabupaten yang lebih maju yaitu Polman, Mamuju, dan Pasangkayu. Perbedaan potensi ekonomi dan ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan di tiap daerah. Pada gilirannya akan berimbas kepada disparitas distribusi pendapatan antardaerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan fiskal regional untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi antardaerah yang saat ini tergolong rendah dan mencegah pelebaran ketimpangan saat terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulbar.

Terdapat beberapa upaya optimalisasi kebijakan fiskal yang dapat ditempuh untuk mempertahankan pemerataan distribusi pendapatan antarkabupaten yang sudah cukup baik di Sulbar. Pertama, alokasi anggaran transfer ke daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur, terutama di kabupaten-kabupaten dengan PDRB per Kapita yang relatif rendah yakni Mamasa, Majene, dan Mamuju Tengah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di ketiga kabupaten tersebut akan terdorong dan mampu mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan dengan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulbar.

Upaya optimalisasi anggaran transfer daerah tersebut telah dilakukan oleh pemda lingkup Sulbar. Sampai dengan triwulan III 2018, total realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemda meningkat sebesar 1,98 persen (yoy). Kinerja penyerapan terbaik terdapat pada komponen DAK Fisik yang tumbuh sebesar 13,51 persen (yoy) meskipun secara pagu anggaran terkoreksi sebesar 3,56 persen (yoy). Begitupun dengan Dana Desa yang terbukti meningkatkan ketersediaan infrastruktur di skala terkecil pemerintahan daerah. Sampai dengan triwulan III 2018, nilai realisasi Dana Desa mencapai Rp283,12 miliar, tumbuh sebesar 2,44 persen (yoy).

Tabel 5.1 PDRB per Kapita 2017 dan Realisasi Belanja Modal Infrastruktur Bidang Pendidikan dan Kesehatan APBD lingkup Sulawesi Barat s.d. Triwulan III 2018 (dalam juta Rupiah)

No	Kabupaten	PDRB per Kapita	Belanja Modal Infrastruktur Bid. Pendidikan	Belanja Modal Infrastruktur Bid. Kesehatan	Total Belanja Modal Infrastruktur Bid. Pendidikan dan Kesehatan
1	Majene	18,85	9.368,89	5.540,41	14.909,30
2	Polewali Mandar	19,31	12.573,52	25.706,72	38.280,25
3	Mamasa	12,72	5.236,82	4.666,90	9.903,72
4	Mamuju	26,82	7.636,65	4.828,02	12.464,67
5	Mamuju Tengah	15,76	6.126,56	6.517,46	12.644,02
6	Pasangkayu	40,41	25.966,77	19.157,67	45.124,44
	Total		66.909,21	66.417,18	133.326,40

Sumber: BPS Provinsi Sulbar, SIKD DJPK Kemenkeu (diolah)

Selanjutnya, untuk mempersempit celah kesenjangan ekonomi antarkabupaten di Provinsi Sulbar, disparitas spasial di bidang pembangunan manusia perlu diminimalkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terus meningkatkan alokasi dan realisasi belanja pemda pada sektor pendidikan dan kesehatan. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat (2018) menunjukkan bahwa jumlah bangunan sekolah tingkat SD-SMA dan sederajat pada tahun 2017 mencapai 2.302 unit atau meningkat 411 unit (yoy). Hal tersebut berkorelasi dengan besaran realisasi belanja modal infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan yang mencapai 3,34 persen dari total realisasi APBD lingkup Provinsi Sulbar.

Lebih lanjut, realisasi belanja modal infrastruktur di kedua bidang tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Pasangkayu (33,85 persen) sebagaimana tampak pada Tabel 5.1. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun PDRB per Kapita penduduknya tertinggi di antara daerah lainnya di Provinsi Sulbar, Pemkab Pasangkayu memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kualitas dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan PDRB per Kapita di masing-masing kabupaten serta semakin mengurangi kesenjangan ekonomi antarkabupaten di Provinsi Sulbar.

REFERENSI

- BPS Provinsi Sulawesi Barat. 2018. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Triwulan III-2018*. No. 52/11/76/Th.XII, 5 November 2018.
Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat
- BPS Provinsi Sulawesi Barat. 2018. *Statistik Daerah Sulawesi Barat 2018*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Veteran
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

